

Abstrak

Pengawasan tahapan pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas dan keabsahan proses demokratisasi di tingkat regional. DPD, sebagai lembaga perwakilan daerah, memerlukan pencalonan yang transparan dan adil guna memastikan partisipasi yang merata dari berbagai lapisan masyarakat.

Bawaslu Kabupaten Belu dalam pengawasan tahapan pencalonan DPD serta mengevaluasi mekanisme pengawasan yang diterapkan untuk meminimalkan risiko pelanggaran dan penyimpangan. Metode penelitian yang digunakan melibatkan analisis dokumen resmi, wawancara dengan pihak terkait, dan pemantauan langsung terhadap proses pencalonan.

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa tahapan pencalonan DPD melibatkan proses seleksi, pengumpulan dukungan, dan verifikasi dokumen. Mekanisme pengawasan yang efektif melibatkan peran aktif dari lembaga pengawas pemilu, pihak terkait, dan masyarakat sipil. Kejelasan pedoman dan regulasi terkait pencalonan, pelibatan masyarakat dalam pengumpulan dukungan, serta transparansi dalam verifikasi dokumen menjadi kunci utama dalam meminimalkan risiko ketidakberesan.

Keputusan ini memberikan kontribusi dalam menyusun rekomendasi perbaikan terkait pengawasan tahapan pencalonan DPD, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum di tingkat daerah. Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan politik yang lebih bersih dan akuntabel, mengokohkan fondasi demokrasi di tingkat regional.